

PENGARUH PELAKSANAAN DEMOKRASI TERHADAP KESEJAHTERAAN: TEORI DAN REALITA (STUDI KASUS: INDONESIA)

Jessica Martha, Arry Bainus, Dudi Heryadi

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran,
Jalan Bukit Dago Utara Nomor 25, Bandung

Email:

jessicamartha1603@gmail.com

Arrybainus@yahoo.com

Dudy.heryadi@unpad.ac.id

Abstract

The implementation of democratic system in a country are often considered as a system which capable to bring prosperity towards its people. Existence of law enforcement, freedom of speech and free access to information as well as surveillance from judiciary are considered as a indicator to create a profitable economy. But it's not always like that. many parties who doubted that the influence of democracy plays such a big role towards economy sector. Writer especially wants to assess how far can the influence of democracy reach towards the well-being of Indonesia people. writer will analyze, are the implementation of democracy has successfully bring prosperity to Indonesian. Therefore, writer use qualitative methods, literature, and data analysis. Writer through this script has concluded that practice of democracy in Indonesia turns out can not bring prosper to Indonesian, yet.

Keywords: Democracy, Welfare, Indonesia, Economy

Abstrak

Penerapan sistem demokrasi di suatu negara seringkali dianggap mampu membawa pada kesejahteraan. Adanya penegakan hukum, kebebasan individu dan akses terhadap informasi, serta pengawasan dari lembaga yudikatif, dianggap dapat menciptakan kegiatan perekonomian yang sehat. Namun teori seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Banyak pihak yang menyangsikan pengaruh demokrasi terhadap kesejahteraan suatu negara. Secara khusus, tulisan ini akan mengkaji sejauh mana pengaruh demokrasi terhadap pencapaian kesejahteraan di Indonesia. Penulis akan menganalisis apakah penerapan demokrasi telah berhasil membawa masyarakat Indonesia ke dalam hidup yang sejahtera. Untuk itu, penulis akan menggunakan metode kualitatif, studi literatur, dan analisa terhadap data. Pada akhirnya, di dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi ternyata belum bisa membawa Indonesia mencapai kesejahteraan.

Kata Kunci: Demokrasi, Kesejahteraan, Indonesia, Ekonomi

1. Pendahuluan

Kata “demokrasi” mungkin menjadi salah satu istilah politik yang paling dikenal oleh banyak orang. Ungkapan “*democracy is a government of the people, by the people, for the people*” yang disampaikan oleh Abraham Lincoln pun telah melekat begitu kuat dalam ingatan kita sehingga demokrasi lebih sering dikenal dengan sebutan pemerintahan rakyat.

Demokrasi begitu dibanggakan oleh para penganutnya karena konsep dasarnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, mengedepankan keadilan, kebebasan berpendapat, dan lainnya. Demokrasi dianggap sebagai satu-satunya sistem politik yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara di suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara demokrasi tanpa segan menyebarkan prinsip-prinsip

demokrasi ke negara lainnya dengan harapan negara-negara tersebut akhirnya ikut menerapkan dan merasakan dampak positif dari demokrasi. Data *World Forum for Democracy* (2012) menyebutkan bahwa sampai saat ini ada 120 negara demokrasi dari 192 negara di dunia dan mencakup hingga 58,2 juta penduduk dunia.¹ Itu artinya lebih dari setengah negara di dunia telah menganut sistem demokrasi.

Sesungguhnya, sistem demokrasi telah ada sejak dulu, tepatnya sejak abad ke-6 sampai abad ke-3 SM di negara-kota Athena. Di bawah kepemimpinan Cleisthenes, Athena dianggap sebagai negara-kota pertama yang berdemokrasi. Cleisthenes pun sampai saat ini dikenal sebagai bapak demokrasi Athena.² Pada masa itu sepertinya baru Athena saja yang menggunakan demokrasi. Negara lain yang menggunakan demokrasi masih sangat jarang ditemui. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, muncul negara-negara baru dan menggunakan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi pun terus berkembang. Banyak negara yang menyesuaikan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai tertentu di negaranya sehingga bentuk demokrasi menjadi banyak, sebut saja demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, dan lainnya. Kehadiran sistem demokrasi juga tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan di dalamnya. Tidak sedikit negara, individu, atau akademisi yang mempertanyakan prinsip, nilai, ataupun praktik demokrasi. Hubungan demokrasi dengan konsep lainnya juga menjadi perdebatan yang selalu ada.

Salah satu perdebatan yang dimaksud adalah hubungan antara demokrasi dan

kesejahteraan. Demokrasi dianggap lebih mudah lahir di negara yang telah mencapai kehidupan yang sejahtera. Adanya perekonomian negara yang kuat akan membawa negara pada kesejahteraan. Kelas menengah yang kuat dan independen muncul. Kualitas pendidikan masyarakat pun semakin berkualitas sehingga demokrasi bisa berkembang di negara tersebut. Sesuai dengan pernyataan semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mungkin ia yakin dalam nilai-nilai demokrasi dan mendukung praktik demokrasi.³ Tetapi pernyataan tersebut tidak sepenuhnya diterima. Bagi sebagian pihak, kesejahteraan belum tentu akan membuat negara-negara akan mengubah sistem politiknya menjadi demokrasi. Kenyataannya, ada beberapa negara yang tetap bertahan dengan sistem otoriter dan bertolakbelakang dengan nilai-nilai demokrasi. Perdebatan pun masih terus berlanjut dan belum ditemukan kepastian apakah kesejahteraan benar-benar membawa sistem demokrasi di suatu negara.

Sebaliknya, banyak orang berpendapat bahwa demokrasi merupakan salah satu jembatan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemunculan sistem demokrasi diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi di suatu negara sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Namun tidak semua sepakat dengan pernyataan tersebut. Sebagian pihak berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Kenyataannya ada negara-negara demokratis yang masih menghadapi kemiskinan dan jauh dari kondisi sejahtera. Sebaliknya, negara-negara non-demokratis ternyata mampu mencapai kesejahteraan dan memiliki kualitas perekonomian yang sangat baik. Maka

¹ World Forum for Democracy. 2012. *Bridging the Gap: Democracy between Old Models and New Realities*.
<http://www.ymps.am/index.php?id=52&m=18> diakses pada 11 Mei 2014.

² Miriam Budiardjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, h.53

³ Amich Alhumami. 2014. *Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan*.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9167&coid=4&caid=4&gid=2 diakses pada 11 Mei 2014.

akhirnya pertanyaan menarik pun muncul, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai salah satu negara penganut demokrasi, Indonesia telah mengalami pasang-surut dalam sistem perpolitikannya. Pergantian pemimpin negara terkadang menyebabkan perubahan dalam sistem politik Indonesia. Meskipun masih mengatasnamakan demokrasi, praktiknya tetap berbeda-beda. Sementara itu, tampaknya masyarakat Indonesia belum merasakan kesejahteraan sepenuhnya. Masih ada rakyat yang harus bersusah payah untuk mendapatkan sesuap nasi. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan diteliti sejauh mana pengaruh pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan rakyat. Apakah demokrasi benar-benar mampu membawa Indonesia ke kondisi kehidupan yang sejahtera? Atau apakah ternyata penerapan demokrasi di Indonesia ternyata merupakan kesalahan karena kesejahteraan bangsa terancam?

2. Konsep Demokrasi dan Kesejahteraan

Meskipun istilah “demokrasi” telah sering didengar dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya tidak semua orang tahu definisi dan makna sesungguhnya dari istilah tersebut. Jika melihat di dalam kamus ataupun ensiklopedia umum, demokrasi berarti suatu pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh mereka secara langsung atau tidak langsung melalui sistem perwakilan yang biasanya melibatkan pemilihan umum berkala.⁴ Definisi yang disampaikan dalam *Merriam-Webster Dictionary* ini merupakan pengertian yang sangat melekat dalam pemikiran masyarakat pada umumnya. Dari pengertian yang disampaikan dalam kamus tersebut, dinyatakan bahwa demokrasi punya beberapa unsur penting, yaitu kekuasaan di tangan rakyat sepenuhnya, partisipasi langsung

ataupun tidak langsung, dan pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Kenyataannya demokrasi tidak hanya mengenai hal-hal tersebut. Demokrasi memiliki makna lebih mendalam yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat ataupun negara tertentu.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos/cratein* (pemerintahan atau kekuasaan). Dari dua kata inilah pengertian demokrasi sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat ditemukan. Definisi demokrasi tidak terbatas pada pengertiannya secara etimologis saja. Ada banyak makna dari demokrasi yang disampaikan oleh para penstudi Hubungan Internasional. Michael J. Sodaro (2004:31) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah sebagai berikut.

“The essential idea of democracy is that the people have the right to determine who governs them. In most cases they elect the principal governing officials and hold them accountable for their actions. Democracies also impose legal limits on the government’s authority by guaranteeing certain rights and freedoms to their citizens.”

Dari pernyataan Sodaro, inti dari demokrasi adalah setiap orang di negara penganut demokrasi memiliki hak untuk memilih siapa saja yang berhak memerintah dalam negaranya. Ketika nanti telah terpilih, para pejabat pemerintah itu diberikan tanggung jawab sepenuhnya dan punya kewajiban untuk menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Sementara bagi masyarakat, mereka memiliki hak dan kebebasannya masing-masing tetapi tetap dibatasi oleh hukum yang diterapkan di negaranya. Sodaro juga menambahkan bahwa demokrasi memiliki “*four faces of democracy*”, yaitu kedaulatan rakyat, hak dan kebebasan, nilai-nilai demokrasi, dan demokrasi ekonomi. Selain Sodaro, Larry Diamond (1999) juga mengemukakan tiga instrumen dari demokrasi, antara lain pemilihan bebas dan adil, kesempatan masyarakat untuk menentukan

⁴<http://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy> diakses pada 11 Mei 2014

nasibnya sendiri, serta kemampuan tiap individu untuk membuat pilihan normatif. Selain Sodaro dan Diamond, banyak penstudi lainnya yang mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi dan instrumen sistem politik tersebut. Sesuai dengan pendapat Laza Kekic (2007:1) bahwa tidak ada satupun konsensus bagaimana mengukur demokrasi, definisi demokrasi yang tepat masih terus dicari dan perdebatan akan terus berlangsung. Tetapi yang jelas, demokrasi menjanjikan kebebasan bagi rakyatnya untuk memilih siapa yang akan memerintah dan menentukan nasibnya sendiri.

Demokrasi seringkali dianggap punya hubungan yang sangat kuat dengan tingkat kesejahteraan di suatu negara karena diaplikasikannya sistem demokrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebebasan yang menjadi poin utama dalam demokrasi dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilakukan tanpa harus ada campur tangan atau pun batasan dari negara. Para produsen dan pemilik modal bisa melakukan apapun untuk memajukan usahanya sehingga berdampak positif pada kualitas perekonomian negara. Selain kebebasan untuk melakukan usaha di dalam negeri, pengusaha dan pemilik modal pun bisa memperluas usahanya ke negara lain sehingga keuntungan semakin meningkat dan memajukan usahanya lebih lagi. Secara teori, ada beberapa keuntungan yang dapat diterima oleh penganut demokrasi dalam menjalankan perekonomian negaranya, antara lain sebagai berikut.

Pertama, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum. Supremasi hukum inilah yang melindungi hak setiap warga negara, menjaga ketertiban, dan juga membatasi kekuatan pemerintah sehingga tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi karena hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang status, gender, ras,

agama, dan lainnya. Hukum adalah adil, tidak memihak, dan konsisten. Hukum juga menjadi perlindungan yang pasti bagi masyarakat, termasuk perlindungan pada hak kepemilikan (*property rights*). Dengan adanya perlindungan yang pasti terhadap hak kepemilikan, mereka memiliki hak untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka juga memiliki hak untuk mengatur kehidupannya sendiri seperti apa yang mereka mau sehingga kemakmuran lebih mungkin tercapai.⁵

Selanjutnya, demokrasi memberikan kebebasan pada setiap individu, tetapi bukan demokrasi tanpa batas karena mereka harus menghormati kebebasan yang dimiliki individu lainnya. Sejalan dengan pandangan kaum liberalisme, penganut demokrasi sangat yakin bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional. Meskipun diberikan kebebasan, setiap orang pasti akan bersikap rasional. Maka dari itu, tiap individu dalam negara demokrasi diyakini tidak akan melanggar kebebasan individu lainnya, berkompromi sebelum bertindak, dan tidak saling menyerang. Pada akhirnya, kebebasan yang dimiliki akan dipakai untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan sisi positif lainnya dalam diri mereka sehingga akan memajukan negara tersebut. Salah satu contohnya, adanya sisi *entrepreneurship* dalam diri seseorang akan menghasilkan usaha-usaha baru dan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya.

Sistem demokrasi juga mendukung perekonomian dengan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi setiap individu. Adanya penyebaran informasi yang merata akan mendukung kegiatan ekonomi. Pembeli dan penjual di pasar akan memiliki informasi yang sama mengenai barang dan jasa sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih efisien. Dengan begitu, produktivitasnya juga semakin

⁵Neville Kennard. 2011. *Democracy versus Property Rights and Prosperity*. <http://economics.org.au/2011/03/democracy-versus-property-rights-and-prosperity/> diakses pada 11 Mei 2014

meningkat. Misalnya, menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), penggunaan internet dalam kegiatan perekonomian ternyata telah memunculkan model bisnis terbaru, meningkatkan daya saing dan fleksibilitas dalam perekonomian, serta memungkinkan lompatan produktivitas di suatu negara.

Keuntungan berikutnya adalah adanya pengawasan dari lembaga-lembaga tertentu sehingga pelaksanaan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lebih baik. Hukum bisa saja melindungi setiap individu dari perlakuan yang tidak sewajarnya. Hukum juga yang menjadi batasan apa saja yang boleh dan sebaiknya tidak dilakukan oleh seseorang. Namun lembaga yang mengontrol dan mengadili setiap pelanggaran juga diperlukan agar hukum bisa berjalan lebih baik lagi. *Trias Politica* pun menyatakan bahwa dalam suatu negara selain ada lembaga eksekutif, legislatif, ternyata diperlukan juga lembaga yudikatif karena tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut, hukum hanya akan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang tidak memiliki sengkang. Para pelaku pelanggaran pun tidak akan segan-segan melakukan pelanggaran. Lembaga-lembaga yudikatif, seperti pengadilan sangat diperlukan agar pelaksanaan hukum dan demokrasi dapat berjalan maksimal.

Keempat keuntungan ini dinilai mampu membawa suatu negara demokrasi menuju kehidupan yang sejahtera. Adanya penegakan hukum, kebebasan individu dan akses terhadap informasi, serta pengawasan dari lembaga yudikatif, dianggap dapat menciptakan kegiatan perekonomian yang sehat. Aktivitas ekonomi di pasar dapat berjalan dengan bebas, tanpa ada campur tangan dari pemerintah, dan tidak akan mengalami gangguan yang berarti karena ada keempat hal tersebut. Friedman (1962) menyatakan pendapatnya mengenai hubungan demokrasi dan ekonomi. Menurutnya, sistem politik yang lebih demokratis akan memperkuat hak-hak ekonomi dan sangat bermanfaat bagi pembangunan

ekonomi. Kebebasan ekonomi individu juga mampu memelihara kegiatan perekonomian sehingga demokrasi merupakan sistem ekonomi yang sangat ideal untuk menciptakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, tidak semua sependapat dengan Friedman. Seorang pengacara dan *Associate Justice on the Supreme Court of the United States*, yaitu Louis Brandeis, menyatakan bahwa demokrasi dan kesejahteraan merupakan dua konsep yang tidak bisa berjalan bersama. Di tahun 1941, Louis Brandeis mengemukakan bahwa suatu negara bisa saja berusaha untuk menjadi negara demokratis atau fokus pada upaya pencapaian kesejahteraan. Namun ia menegaskan bahwa negara tersebut hanya bisa memilih untuk menjalani salah satu dari dua pilihan yang ada karena pada kenyataannya tidak ada satu pun negara bisa memiliki keduanya. Itu artinya, jika suatu negara ingin menciptakan kondisi demokratis di negaranya, jangan berharap untuk bisa mencapai kesejahteraan. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, Louis Brandeis mengungkapkan bahwa demokrasi tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan. Demokrasi tidak pernah bisa membawa negara pada kehidupan yang sejahtera.

3. Perjalanan Praktik Demokrasi di Indonesia

Amerika Serikat sebagai salah satu negara demokrasi berhasil menjadi negara yang disegani oleh negara lainnya. Penerapan sistem demokrasi di Amerika Serikat telah berlangsung sangat lama. Bukan hanya itu saja, Amerika Serikat juga menyebarkan demokrasi ke negara-negara lainnya dan menjadikan penyebaran demokrasi sebagai salah satu agenda negaranya. Demokrasi diyakini oleh Amerika Serikat sebagai sistem politik terbaik yang akan membawa setiap negara pada kesejahteraan. Tanpa demokrasi, kesejahteraan hanyalah impian belaka. Hal ini pernah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Barrack Obama, saat mengunjungi

Universitas Indonesia. Menurutnya, *prosperity without freedom is just another form of poverty*.⁶ Dengan kata lain, Amerika Serikat meyakini bahwa kesejahteraan harus diimbangi dengan adanya kebebasan bagi setiap warga negaranya. Tanpa kebebasan, negara tersebut bisa dikatakan masih berada di bawah kemiskinan dan kebebasan hanya ditawarkan oleh sistem demokrasi. Maka dari itu, pihak pemerintah Amerika Serikat memberikan kebebasan sepenuhnya dan hal tersebut sangat dinikmati oleh masyarakatnya. Wajar saja jika Amerika Serikat sering disebut sebagai salah satu negara penganut demokrasi terbaik di dunia.

Di sisi lain, China berusaha untuk menyaingi kekuatan Amerika Serikat sebagai negara kuat di dunia. Jika negara lain berusaha mengimbangi kekuatan Amerika Serikat melalui cara militer, maka China lebih memilih untuk memajukan perekonomian negaranya. China bukanlah negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Negara tirai bambu ini lebih tertutup dan memusatkan segala sesuatunya kepada pemerintah yang berkuasa. Namun China tidak melakukan hal yang sama pada kegiatan ekonominya. Sedikit demi sedikit, China membuka diri kepada dunia luar. Mereka melakukan ekspansi ke pasar-pasar di negara lainnya dengan harapan dapat meraih konsumen lebih banyak lagi. Adanya peningkatan jumlah konsumen akan membawa dampak positif berupa penambahan profit. Besarnya keuntungan yang didapat pun akan menjamin jalannya aktivitas produksi perusahaan-perusahaan asal China. Akhirnya, lagi-lagi China diuntungkan. Saat ini, hampir semua negara dibanjiri oleh barang-barang asal China dan banyak negara yang tidak bisa lepas dari hasil produksi negara tirai bambu ini.

Keberhasilan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi dan China yang non-

demokrasi membuat perdebatan semakin panas. Lalu bagaimana dengan negara lainnya? Indonesia merupakan salah satu negara yang memutuskan untuk menerapkan sistem demokrasi. Setelah 68 tahun merdeka, Indonesia telah mengalami pergantian sistem politik sampai akhirnya menjadi negara yang demokratis. Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut demokrasi dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat. Pemimpin negara dipilih oleh rakyat. Pemimpin yang terpilih itu harus mempertanggungjawabkan tugas dan kepemimpinannya pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipercaya sebagai wakil rakyat.

Sepanjang perjalanannya, penerapan demokrasi di Indonesia diwarnai pula oleh perubahan dan penyesuaian tertentu. Dimulai pada masa revolusi (1945-1950) dimana revolusi fisik masih sering terjadi sehingga demokrasi dinilai belum berjalan dengan baik. Lalu, pada masa orde lama, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal dimana presiden saat itu hanya menjadi lambang negara saja dan tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintah (eksekutif). Di masa yang sama, terjadi perubahan sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Perbedaannya terletak pada peran presiden yang ternyata lebih dominan dibandingkan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1966, Indonesia masuk pada era baru, yaitu orde baru dan saat itu dikenal demokrasi pancasila. Sayangnya, perjalanan demokrasi pada masa orde baru dinilai gagal karena ada praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, masa reformasi akhirnya menggantikan orde baru dan pemerintahan saat itu berusaha untuk membangun kembali kehidupan demokratis di Indonesia. Praktik demokratis pada masa reformasi ditandai dengan dilakukannya pemilihan umum demokratis yang disambut

⁶Bawono Kumoro. 2011. *Demokrasi dan Kesejahteraan*.
<http://www.investor.co.id/home/demokrasi-dan-kesejahteraan/4418> diakses pada 12 Mei 2014

dengan sangat antusias oleh masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih berjalan hingga saat ini. Pasca reformasi, Indonesia sempat beberapa kali mengalami pergantian presiden. Meskipun begitu, sistem politik di Indonesia belum pernah mengalami perubahan bahkan mungkin belum pernah terpikirkan untuk mengganti demokrasi dengan sistem lainnya. Pemerintah Indonesia yakin bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang paling cocok untuk diterapkan. Sepanjang perjalanannya, setiap individu di Indonesia memang telah merasakan kebebasan. Mereka dapat mengatur sendiri kehidupannya, memilih apa yang mereka kehendaki, dan semuanya itu dilindungi oleh hukum. Selain itu, aktivitas negara juga diimbangi dengan lembaga dan institusi yang memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, transparan, dan tidak melanggar hukum. Indonesia pun telah berkali-kali melakukan pemilihan umum mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Semangat demokrasi di Indonesia tampaknya sangat kuat dan nilai-nilainya pun dijunjung tinggi oleh setiap individu.

Namun ternyata itu semua belum cukup. Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dianggap kurang dan belum mencapai makna demokrasi yang sesungguhnya. Ginandjar Kartasasmita menjadi salah satu pihak yang mengkritik perjalanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia lebih sering menonjolkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan rakyat, padahal di dalam demokrasi rakyat dinilai memegang kedaulatan sepenuhnya.⁷ Konflik antargolongan pun lebih sering terjadi karena setiap golongan ingin kepentingannya yang didahulukan dan tanpa sadar kepentingan rakyat mereka tinggalkan. Tentu saja kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi

yang lebih mengutamakan pemenuhan terhadap kepentingan rakyat. Pemerintahan pun akhirnya dijalankan oleh orang-orang yang tidak sepenuhnya fokus pada kepentingan rakyat sehingga dinilai belum efektif, efisien, kredibel, dan profesional. Kemudian, praktik demokrasi di Indonesia juga belum bisa terlepas sepenuhnya dari politik uang, tindakan korupsi, dan tindakan-tindakan terlarang lainnya. Semuanya itu tidak terlepas dari adanya kepentingan golongan dan kepentingan pribadi yang lebih diutamakan. Pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum dinilai hanya membuang-buang uang karena tidak semua orang bisa memiliki hak politik yang sama atau pun mengerti makna sesungguhnya dari pemilihan umum dan praktik demokrasi. Seluruh kritik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia ternyata membawa dampak yang buruk dan akhirnya mempertaruhkan nasib dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

4. Praktik Demokrasi dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Bangsa Indonesia

Pasang-surutnya praktik demokrasi di Indonesia ternyata membawa permasalahan baru bagi bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat pun menjadi suatu pertanyaan besar. Bila kita melihat kondisi rakyat saat ini, tampaknya sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa bangsa kita telah mencapai hidup yang sejahtera. Kita masih sering menemukan orang-orang yang sulit mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak pula yang harus tinggal di tempat kumuh sehingga sangat rentan terhadap berbagai penyakit berbahaya. Jika kembali pada perdebatan mengenai pengaruh demokrasi terhadap kesejahteraan suatu bangsa, beberapa menyatakan bahwa demokrasi bisa menjamin kesejahteraan rakyat karena setiap instrumen di dalam demokrasi sangat mendukung untuk terciptanya kesejahteraan. Namun bagi sebagian pihak demokrasi bukanlah suatu kepastian untuk menciptakan kesejahteraan bangsa. Demokrasi tidak memiliki hubungan

⁷Ruslan Burhani. 2008. *Ginandjar Kritik Demokrasi di Indonesia*.

<http://www.antaraneews.com/berita/100359/ginandjar-kritik-demokrasi-di-indonesia> diakses pada 12 Mei 2014

dan tidak akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan di suatu negara.

Untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia, maka kita perlu mengetahui indikator kesejahteraan yang diterapkan di Indonesia. Setiap negara memiliki indikator kesejahteraannya masing-masing dan beberapa indikator kesejahteraan tersebut pernah digunakan oleh Indonesia, sebut saja *Human Development Index* (HDI) dari UNDP. HDI berisikan analisis empiris dari isu-isu pembangunan utama, tren, dan kebijakan terkait pembangunan kemanusiaan. UNDP secara rutin menerbitkan laporan ini sejak tahun 1990 sebagai bahan rekomendasi kepada negara-negara di dunia dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas indeks pembangunan kemanusiaan di negaranya masing-masing. Jika melihat dari HDI, Indonesia meraih peringkat ke-121 dari 186 negara dan delapan negara teritori. Semua negara diklasifikasikan ke dalam empat kelas berdasarkan hasil akhir penilaian di setiap parameter. Empat kelas tersebut, antara lain *Very high human development* (urutan 1-47), *High human development* (urutan 48-94), *Medium human development* (urutan 95-141), dan *Low human development* (urutan 142-147). Indonesia pada tahun 2013 berada di peringkat 121 menempati kelas *Medium human development*.⁸ Itu berarti, Indonesia belum sepenuhnya sejahtera dan masih harus melakukan berbagai upaya untuk mencapai peringkat lebih tinggi. Berikut data yang didapat dari laporan HDI tahun 2013.

Tabel 4.1
Indonesia dalam *Human Development Index* 2013

Komponen	Poin
Human Development Index (HDI)	0,629
Life expectancy at birth	69,8
Mean years of schooling	5,8
Expected years of schooling	12,9
Gross national income (GNI) per capita	4,154

⁸ UNDP. 2013. *2013 Human Development Report*. <http://hdr.undp.org/en/2013-report> diakses pada 13 Mei 2014

Sumber: UNDP. 2013. *2013 Human Development Report*. <http://hdr.undp.org/en/2013-report> diakses pada 13 Mei 2014

Indikator kedua adalah *Gross National Happiness* (GNH) yang pertama kali diperkenalkan oleh Raja Bhutan, Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1972. Ia memperkenalkan konsep ini sebagai bentuk komitmennya untuk membangun perekonomian Bhutan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritualitas dan kebudayaan rakyat Bhutan. Pada awalnya konsep ini hanya ucapan biasa saja, bukan suatu konsep yang dianggap begitu serius. Namun ternyata *the Centre of Bhutan Studies*, di bawah kepemimpinan Karma Ura⁹, mengembangkan konsep dan setiap instrumen dalam *Gross National Happiness* sehingga akhirnya dipakai menjadi alat ukur tingkat kebahagiaan penduduk Bhutan. Menurut Karma Ura, dkk (2012), konsep pengukuran ini mencakup sembilan aspek/dimensi dan terdiri atas 33 indikator yang diambil dari 124 variabel. Dengan melihat semua indikator dan variabel yang dibutuhkan, Norwegia menjadi negara dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi. Peringkat berikutnya, Australia, Belanda, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Irlandia, *Liechtenstein*, Jerman, dan Swedia.¹⁰ Sayangnya, Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat sepuluh besar. Itu tandanya, berdasarkan GNH, Indonesia belum menjadi negara sejahtera dan bahagia.

Selain HDI dan GNH, ada pula *Physical Quality Life Index* (PQLI), yaitu sebuah metode pengukuran kesejahteraan penduduk yang diperkenalkan oleh Mooris. Metode ini

⁹ Karma Ura. 2012. *A Short Guide to Gross National Happiness Index* <http://www.grossnationalhappiness.com/wp-content/uploads/2012/04/Short-GNH-Index-edited.pdf> h.8 diakses pada 14 Mei 2014

¹⁰ Jane Leung. 2011. *World's Happiest Countries: 1 to 187* <http://travel.cnn.com/explorations/life/united-nations-announces-world%E2%80%99s-happiest-country-247768> diakses pada 14 Mei 2014

mengesampingkan pengukuran terhadap pendapatan nasional dan lebih mengedepankan tiga indikator non-ekonomi, yaitu rata-rata jumlah kematian bayi (jumlah kematian bayi tahunan dari bayi yang berumur di bawah satu tahun per 1.000 bayi hidup); rata-rata harapan hidup (dihitung setelah bayi berumur satu tahun); rata-rata persentase buta dan melek huruf. Dua indikator, yaitu rata-rata jumlah kematian bayi dan rata-rata harapan hidup mewakili pengaruh nutrisi, kesehatan masyarakat, pendapatan dan lingkungan umum. Sementara pengukuran terhadap rata-rata persentase buta dan melek huruf mewakili pengukuran terhadap tingkat pendidikan di suatu negara. Meskipun indikator PQLI berbeda dengan HDI dan GNH, ternyata PQLI juga menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang belum sejahtera. Data menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat terbawah dan tertinggal jauh dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura.¹¹

Indonesia juga pernah menggunakan *Legatum Prosperity Index*, merupakan peringkat tahunan, yang dikembangkan oleh Legatum Institute, melibatkan pengukuran terhadap 142 negara. Perhitungan ini didasarkan pada berbagai faktor, seperti kekayaan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pribadi, dan kualitas hidup. Paramater pengukurannya, antara lain:

1. Subindeks ekonomi, mengukur kinerja dalam empat bidang utama negara: kebijakan ekonomi makro, ekonomi kepuasan dan harapan, yayasan untuk pertumbuhan, dan sektor keuangan efisiensi.
2. Subindeks *governance*, mengukur kinerja negara dalam tiga bidang: efektif dan pemerintah yang akuntabel, pemilihan umum yang adil dan

partisipasi politik, dan supremasi hukum.

3. *Entrepreneurship & opportunity*, mengukur tingkat kewirausahaan suatu negara, promosi kegiatan inovatif, dan pemerataan kesempatan.
4. Subindeks pendidikan, mencakup kinerja negara dalam tiga bidang: akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan sumber daya manusia.
5. Subindeks kesehatan, meliputi kinerja negara dalam tiga bidang: hasil kesehatan dasar (obyektif maupun subyektif), infrastruktur kesehatan, dan perawatan pencegahan.
6. Subindeks keselamatan dan keamanan, meliputi kinerja negara dalam dua hal: keamanan nasional dan keselamatan pribadi.
7. Subindeks kebebasan individu, mengukur kinerja dan kemajuan negara-negara dalam menjamin kebebasan individu dan toleransi sosial menggembarakan.
8. Subindeks *social capital* mengukur kinerja negara dalam dua bidang: sosial kohesi dan keterlibatan jaringan masyarakat dan keluarga.

Dalam *Legatum Prosperity Index 2013*, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 142 negara. Sebenarnya, posisi ini tidak terlalu membanggakan bagi Indonesia. Untuk kesekian kalinya, Indonesia tertinggal oleh Singapura (18), Malaysia (44), Thailand (52), Vietnam (62), dan Filipina (66). Bila dibandingkan dengan tahun 2012, Indonesia ternyata mengalami penurunan karena sebelumnya berada di peringkat 63. Namun jika melihat tahun-tahun sebelumnya, posisi ke-69 tidaklah buruk karena pada tahun 2009-2011, Indonesia pernah ada di peringkat ke 85, 70, dan 70.¹² Berikut adalah hasil perhitungan *Legatum Prosperity Index* Indonesia.

¹¹Numbeo. 2013. *Quality of Life Index for Country 2013*. http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2013-Q1 diakses pada 14 Mei 2014

¹² Indonesia Kreatif. 2014. *The Legatum Prosperity Index 2013*. <http://gov.indonesiakreatif.net/legatum-prosperity-index-2013/> diakses pada 15 Mei 2014

Tabel 4.2
Indonesia dalam *Legatum Prosperity Index 2013*

Parameter	Ranking
Overall	69
Economy	35
Entrepreneurship and Opportunity	87
Governance	77
Education	83
Health	94
Safety and security	70
Personal freedom	105
Social capital	32

Sumber: Legatum Institute. 2013. *Indonesia-69th*. <http://prosperity.com/#!/country/IDN> diakses pada 15 Mei 2014.

Selain pengukuran-pengukuran di atas, Indonesia juga menggunakan pengukuran lainnya seperti *The Better Life Index* yang biasa digunakan oleh negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika. Pengukuran dilakukan oleh *Organization for Economic Cooperation* (OECD). Indikator pengukurannya adalah pendapatan negara, keamanan, dan tingkat pengangguran karena menurut OECD, semua indikator itulah yang membentuk kualitas individu dan mampu menciptakan kesejahteraan. Dalam *The Better Life Index*, Australia menempati posisi pertama, disusul oleh Austria dan Belgia. Sementara di peringkat terbawah, yaitu posisi ke 34 ditempati oleh Turki.¹³ Jika melihat data OECD, tampaknya Indonesia pun tertinggal jauh dan masih dikategorikan sebagai negara yang belum mencapai kesejahteraan.

HDI, GNH, PQLI, *Legatum Prosperity Index*, dan *The Better Life Index* menunjukkan hasil pengamatan yang kurang memuaskan mengenai kesejahteraan Indonesia. Kelima pengukuran internasional tersebut menyatakan bahwa Indonesia belum menjadi negara yang sejahtera dan tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya, bahkan Indonesia berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jika melihat sumber daya yang dimiliki oleh

Indonesia, seharusnya Indonesia bisa berada di atas negara-negara Asia Tenggara. Namun ternyata hasil pengamatan dari lembaga-lembaga internasional menyatakan hasil sebaliknya. Dari berbagai indikator pengukuran pun Indonesia tampaknya masih perlu berbenah dan berjuang keras untuk mencapai kesejahteraan yang didambakan oleh semua masyarakatnya. Indonesia tidak dapat berpuas diri dengan kondisinya saat ini karena kesejahteraan masyarakat tampaknya masih jauh.

Selain kelima indikator pengukuran internasional yang ada, ternyata Indonesia juga memiliki indikator pengukurannya sendiri, yaitu Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). Hadirnya IKraR akan digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi dan realitas yang ada. Metode pengukuran IKraR dibentuk karena metode-metode sebelumnya dianggap belum memadai untuk menggambarkan Indonesia yang sebenarnya. IKraR pertama kali diperkenalkan pada 21 Maret 2012 oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, HR. Agung Laksono. Pengukuran pada IKraR difokuskan pada tiga dimensi, yaitu dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi, dan dimensi demokrasi. Adapun variabel yang dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran adalah sebagai berikut.¹⁴

A. Dimensi Keadilan Sosial

- a. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama.
- b. Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat selama 6 bulan terakhir.
- c. Persentase rumah tangga yang melakukan rekreasi (berlibur, olah raga/kesenian).

¹³OECD. 2013. *OECD Better Life Index*. <http://www.oecd.org/statistics/datalab/bli.htm> diakses pada 15 Mei 2014

¹⁴ Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals. 2013. *IKraR Indikator Pelengkap IPM*. <http://www.indonesiamdgs.org/articles/view/ikrar-indikator-pelengkap-ipm> diakses pada 16 Mei 2014

- d. Rata-rata lama sekolah penduduk di atas usia 15 tahun.
- e. Persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu Sehat, Surat Miskin atau lainnya).
- f. Persentase penduduk yang usianya mencapai di atas 40 tahun.
- g. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum.
- h. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama.
- i. Persentase penduduk tidak miskin atau pengeluaran perkapita > Garis Kemiskinan.
- j. Tingkat pemerataan pendapatan.

B. Dimensi Keadilan Ekonomi

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri.
- b. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.
- c. Rasio rerata pengeluaran per kapita per bulan dengan Garis Kemiskinan.
- d. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD.
- e. Persentase rumah tangga yang menerima kredit dari bank.
- f. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap total pengeluaran.
- g. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan terhadap total pengeluaran.

C. Dimensi Demokrasi

- a. Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.
- b. Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir.
- c. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia.
- d. Aspek Hak-Hal Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

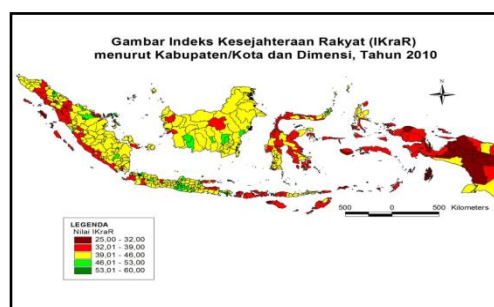
e. Aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Rentang nilai IKraR ditetapkan antara 0-100 untuk setiap dimensi. Nilai 100 adalah nilai ideal yang mengindikasikan bahwa sangat sejahtera atau dengan kata lain tujuan akhir telah tercapai dengan sangat baik. Dari nilai-nilai yang telah dikumpulkan, dapat terlihat penilaian untuk setiap daerah di Indonesia, dimanakah posisi daerah tersebut berada, dan bagaimana kondisi daerah tersebut jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, dapat dilihat juga dimensi mana saja yang masih bernilai rendah sehingga bisa ditemukan solusi efektif untuk setiap dimensi. Pada akhirnya, negara bisa mencapai kesejahteraan sepenuhnya. Lalu, bagaimana hasil penelitian IKraR terhadap daerah-daerah di Indonesia?

Gambar 1. Indeks Kesejahteraan Rakyat Menurut Provinsi 2010



Gambar 1. Indeks Kesejahteraan Rakyat Menurut Kabupaten/Kota 2010



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2012. *Bahan Paparan Menko Kesrapada Sidkab Terbatas Bidang Kesratentang Review Program Pengurangan Kemiskinan* (Dipresentasikan di Jakarta, 29 Mei 2012)

Dari kedua gambar di atas, tampaknya masih sangat sulit untuk menemukan kabupaten/kota dan provinsi yang mendapatkan nilai IKraR paling tinggi (berwarna hijau). Sebagian besar wilayah Indonesia mendapatkan nilai 42,01-47,00 yang ditandai dengan warna kuning. Bahkan sejumlah daerah di Indonesia bagian timur ada banyak kabupaten/kota dan provinsi yang berwarna merah, dimana itu berarti daerah-daerah tersebut memiliki nilai kesejahteraan sangat rendah. Dari dua data di atas juga sebenarnya dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan yang begitu tinggi antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Misalnya saja, untuk Indonesia di bagian barat, tidak ditemui daerah yang nilainya relatif tinggi (47,01-52,00). Tetapi lain halnya dengan Indonesia di bagian tengah. Pada bagian tersebut, ada beberapa provinsi yang berwarna hijau muda dan itu menandakan bahwa provinsi tersebut sudah relatif sejahtera. Sementara pada bagian timur, hampir semua wilayahnya berwarna oranye dan merah.

Inilah masalah yang masih dihadapi Indonesia, yaitu adanya kesenjangan yang begitu tinggi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Selain itu, distribusi berbagai kebutuhan hidup juga tidak merata sehingga ada wilayah-wilayah yang berkecukupan sementara di wilayah lainnya mengalami kelangkaan. Kemudian, Indonesia juga masih mengalami berbagai permasalahan yang membuat kesejahteraan belum dapat tercapai, sebut saja tingkat korupsi yang masih tinggi, harga kebutuhan pokok yang relatif tinggi sehingga memberatkan masyarakat, dan lainnya.¹⁵ Namun setidaknya Indonesia masih bisa berbangga hati karena menurut pemaparan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tingkat kesejahteraan rakyat selama tiga tahun terakhir (2008-2010)

telah mengalami kenaikan.¹⁶ Namun itu semua belumlah cukup karena masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Tampaknya perjalanan masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masih panjang.

5. Kesimpulan

Budaya demokrasi di Indonesia telah mengakar selama bertahun-tahun. Secara teori, demokrasi merupakan sistem politik yang sangat terbuka dan mampu membawa negara pada kesejahteraan. Nilai-nilai yang dianutnya, seperti kebebasan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia seharusnya mampu menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera, sama halnya dengan negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat. Namun ternyata teori demokrasi tidak berjalan dengan begitu baik di Indonesia. Kenyataannya Indonesia belum mencapai kesejahteraan. Beberapa sistem pengukuran kesejahteraan internasional telah menyatakan bahwa Indonesia masih jauh dari standar kesejahteraan. Merasa tidak puas dengan sistem pengukuran internasional, Indonesia pun meluncurkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) di tahun 2012 dengan mengangkat indikator yang berbeda dan dianggap lebih menyentuh kondisi Indonesia sesungguhnya. Tetapi seperti halnya IKraR juga menghasilkan penilaian yang tidak jauh berbeda. Indonesia belum sejahtera dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai kesejahteraan.

Dari paparan yang ada, ternyata tidak semua negara demokrasi mampu mencapai kesejahteraan. Tampaknya, sistem politik bukanlah satu-satunya syarat utama untuk bisa sejahtera. Ada banyak hal lainnya yang harus diperjuangkan dan diperhatikan oleh suatu negara bila ingin mencapai kesejahteraan.

¹⁵Adi Agus Santoso. 2012. *Khofifah: Masih ada Ketidakadilan dan Ketidaksejahteraan*. <http://surabaya.tribunnews.com/2012/04/08/khofifah-masih-ada-ketidakadilan-dan-ketidaksejahteraan> diakses pada 16 Mei 2014

¹⁶Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2012. *Bahan Paparan Menko Kesrapada Sidkab Terbatas Bidang Kesratenteng Review Program Pengurangan Kemiskinan* (Dipresentasikan di Jakarta, 29 Mei 2012).

Permasalahan domestik juga perlu diselesaikan secepat mungkin agar kesejahteraan bisa tercapai secara optimal. Tetapi bukan hanya pemerintah saja yang perlu berjuang. Masyarakat, individu demi individu pun perlu mencurahkan perhatiannya dan mengusahakan berbagai cara untuk memajukan Indonesia dan mencapai kesejahteraan Indonesia sesungguhnya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka kesejahteraan pun sebaiknya berawal dari rakyat, dikerjakan bersama-sama oleh rakyat, dan semua hasilnya untuk rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
Surbakti, Ramlah. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Websites:

Alhumami, Amich. 2014. *Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan*.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9167&coid=4&caid=4&gid=2 diakses pada 11 Mei 2014.
Burhani, Ruslan. 2008. *Ginandjar Kritik Demokrasi di Indonesia*.
<http://www.antarane.ws.com/berita/100359/ginandjar-kritik-demokrasi-di-indonesia> diakses pada 12 Mei 2014

Indonesia Kreatif. 2014. *The Legatum Prosperity Index 2013*.
<http://gov.indonesiakreatif.net/legatum-prosperity-index-2013/> diakses pada 15 Mei 2014

Kennard, Neville. 2011. *Democracy versus Property Rights and Prosperity*.
<http://economics.org.au/2011/03/democracy-versus-property-rights-and-prosperity/> diakses pada 11 Mei 2014

Kumoro, Bawono. 2011. *Demokrasi dan Kesejahteraan*.
<http://www.investor.co.id/home/demokrasi-dan-kesejahteraan/4418> diakses pada 12 Mei 2014

Leung, Jane. 2011. *World's Happiest Countries: 1 to 187*
<http://travel.cnn.com/explorations/life/united-nations-announces-world%E2%80%99s-happiest-country-247768> diakses pada 14 Mei 2014

Numbeo. 2013. *Quality of Life Index for Country 2013*.
http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2013-Q1 diakses pada 14 Mei 2014

Santoso, Adi Agus. 2012. *Khofifah: Masih ada Ketidakadilan dan Ketidaksejahteraan*.
<http://surabaya.tribunnews.com/2012/04/08/khofifah-masih-ada-ketidakadilan-dan-ketidaksejahteraan> diakses pada 16 Mei 2014

Ura, Kharma. 2012. *A Short Guide to Gross National Happiness Index*
<http://www.grossnationalhappiness.com/wp-content/uploads/2012/04/Short-GNH-Index-edited.pdf> h.8 diakses pada 14 Mei 2014

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy> diakses pada 11 Mei 2014

Makalah:

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2012. *Bahan Paparan Menko Kesrapada Sidkab Terbatas Bidang Kesratentang Review Program Pengurangan Kemiskinan* (Dipresentasikan di Jakarta, 29 Mei 2012).

Dokumen Resmi (online):

Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals. 2013. *IKraR Indikator Pelengkap IPM*. <http://www.indonesiamdgs.org/articledetails/view/ikrar-indikator-pelengkap-ipm> diakses pada 16 Mei 2014

OECD. 2013. *OECD Better Life Index*. <http://www.oecd.org/statistics/datalab/bli.htm> diakses pada 15 Mei 2014

UNDP. 2013. *2013 Human Development Report*. <http://hdr.undp.org/en/2013-report> diakses pada 13 Mei 2014

World Forum for Democracy. 2012. *Bridging the Gap: Democracy between Old Models and New Realities*. <http://www.ymps.am/index.php?id=52&mid=18> diakses pada 11 Mei 2014.